BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks ini adalah berdasarkan kaidah ushul yang berbunyi :
 - "Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan".
 - Diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudhārat* (risiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa risiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudhārat* (risiko), maka dipilih *mudhārat* (risiko) yang lebih ringan.
- Dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut sudah relevan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan

Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim mempunyai kewenangan untuk menafsirkan bahwa ketidakmampuan istri melayani hubungan seks suami yang *hypersex* dianggap sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri, sehingga hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

B. Saran

- 1. Untuk para hakim di lingkungan Pengadilan Agama hendaknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya tentang perizinan poligami dengan alasan istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang *hypersex* yang mana bisa dijadikan celah hukum bagi lakilaki dengan mudah mendapatkan izin poligami.
- Untuk masyarakat meskipun poligami itu diperbolehkan oleh Islam namun harus berlaku adil dalam lahir dan batin serta mampu dalam segi ekonomi.